



PERSEPSI GURU TENTANG PEMAHAMAN INDIKATOR STANDAR PEMBIAYAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS

Ossi Marga Ramadhan*, Chaerul Rochman, Ida Farida & Supiana

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

Abstract

This research was conducted to determine the extent of teachers' perceptions of the standard indicators of financing for high school education at the National Education Standards (SNP). This study used descriptive qualitative method. The population was 10 respondents, divided into 5 Islamic education teacher respondents and 5 Non-Islamic Islamic education teacher respondents from several schools in Purwakarta Regency. The instrument used was to use a questionnaire about understanding the standard of financing, which amounted to 16 indicators, then given triangulation through direct interviews to find out the causes and solutions to problems related to the achievement of financing standards. The results of this study indicate that the achievement of indicators is at an average of 82% in the Non-Islamic Education group and 79% in the Islamic Education group. Several weaknesses were found regarding the standard indicators of financing, among others in the aspect of the realization of the cost of periodic maintenance and repairs and the aspect of reporting and delivering financial accountability. Based on the findings in the field, the researchers have recommendations for schools and related parties to pay more attention to the stages of education financing budgeting, especially during the planning, realization, and reporting stages and submission of financing reports.

Keywords: teacher perceptions; financing standards; National Education Standards.

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana persepsi guru mengenai indikator standar pembiayaan pendidikan sekolah tingkat menengah atas pada Standar Nasional Pendidikan (SNP). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Populasi berjumlah 10 responden yang terbagi menjadi 5 responden guru PAI dan 5 responden guru Non-PAI dari beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Purwakarta. Instrumen yang digunakan adalah dengan menggunakan angket mengenai pemahaman terhadap standar pembiayaan yang berjumlah 16 indikator, kemudian diberikan triangulasi melalui wawancara secara langsung untuk mengetahui penyebab dan solusi terhadap permasalahan terkait pencapaian standar pembiayaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketercapaian indikator berada pada rata-rata 82% pada kelompok Non-PAI dan 79% pada kelompok guru PAI. Ditemukan beberapa kelemahan mengenai indikator standar pembiayaan antara lain pada aspek perealisasi biaya pemeliharaan dan perbaikan berkala dan aspek pelaporan dan penyampaian pertanggungjawaban keuangan. Berdasarkan temuan di lapangan peneliti memiliki rekomendasi untuk sekolah serta pihak yang terkait agar lebih memperhatikan tahapan penganggaran pembiayaan pendidikan terutama pada saat tahapan perencanaan, perealisasi serta pelaporan dan penyampaian laporan pembiayaan.

Kata Kunci: persepsi guru; standar pembiayaan; Standar Nasional Pendidikan.

PENDAHULUAN

Capaian keberhasilan suatu lembaga pendidikan dapat dilihat dari bagaimana mutu pendidikan yang ada, tak heran apabila lembaga pendidikan seolah berlomba untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan terhadap dunia pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikannya (Elviera et al., 2019, p. 1). Tentulah sulit dipungkiri bahwa beberapa kebutuhan di dalam lembaga pendidikan itu dirancang salah satunya mengacu pada aspek pembiayaan, apabila layanan pendidikan yang ditawarkan tersebut baik, itu bisa jadi karena pengelolaan anggaran pendidikan seperti pemasukan dan pengeluarannya diperuntukkan dengan baik, yang diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang

Article History | Submitted: July 10, 2020 | Accepted: August 23, 2020 | Published: August 24, 2020

How to Cite (APA 6th Edition style):

Ramadhan, O.M., Rochman, C., Farida, I & Supiana. (2020). Persepsi Guru tentang Pemahaman Indikator Standar Pembiayaan Sekolah Menengah Atas. *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial*, 4(2), 93-100.

DOI: 10.30743/mkd.v4i2.2626

*Correspondance Author: ossimarga33@gmail.com

memiliki kualitas lulusan yang baik dan bermutu. Hal ini senada dengan Sudarsono yang mengatakan bahwa mutu pendidikan itu selalu diiringi oleh bagaimana perihal pembiayaannya (Sudarsono, 2016, p. 94).

Namun hal tersebut dirasa sulit termanifestasikan apabila tidak ada kerjasama diantara pihak yang terkait, hal ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 Pasal 46 Ayat 1 (2003) yang intinya bahwa pembiayaan pendidikan menjadi tanggungan bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat. Begitu juga di dalam Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan Pendidikan Nomor 4 Tahun (2008). Oleh sebab itu pihak-pihak tersebut harus memiliki kewajiban dan tanggungjawabnya untuk melaksanakan kewajibannya masing-masing dalam memastikan perihal pembiayaan pendidikan dapat terselenggara dengan efektif dan efisien. Serta terdapat kolaborasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat untuk ikut andil dalam *monitoring* arah perjalanannya agar langkahnya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Hal ini dilakukan agar pendidikan terselenggara dengan baik. Untuk itu ketersediaan dana yang mencukupi penyelenggaraan pendidikan haruslah ada dan dialokasikan dengan baik, agar proses pendidikan pun terlaksana dengan baik. Hal ini sesuai dengan pernyataan Supriadi bahwa bagian yang penting dalam pelaksanaan pendidikan salah satunya adalah mengenai biaya pendidikan. Hal ini penting sebab diperlukan untuk menjamin ketersediaannya berbagai fasilitas implementasi kebijakan serta berbagai program dalam lembaga pendidikan, serta untuk terlaksananya aktivitas intra dan ekstra di sekolah, dan juga untuk mengembangkan sekolah sebagai lembaga pendidikan yang memiliki mutu yang baik (Supriadi, 2006, p. 12).

Senada dengan itu, Fattah mengatakan bahwa dalam komponen-komponen input pendidikan yang tidak dapat dihindari keberadaannya yaitu adalah faktor pembiayaan pendidikan. Sebab pendidikan adalah sebuah proses, proses belajar mengajar yang dituntut harus bermutu, sementara itu input yang bermutu menghasilkan proses mengajar yang bermutu juga, yang kemudian membuat impact dari hasil pembelajaran yang baik (Fattah, 1999, pp. 51-56). Dalam penelitiannya, Syamsudin memaparkan bahwa anggaran dalam pendidikan mempengaruhi mutu dari hasil belajar dengan melalui mutu proses belajar yang baik (Syamsudin, 2009, p. 5).

Hal tersebut memberikan gambaran bahwa kedudukan dari pembiayaan terhadap terselenggaranya pendidikan itu merupakan hal yang sangat penting. Oleh karena itu, dana yang memadai akan mendukung dan melancarkan proses penyelenggaraan pendidikan. Serta pengalokasian anggaran yang tepat akan memudahkan dalam mencapai tujuan pendidikan. Dan capaian tujuan pendidikan itu dipengaruhi oleh pembiayaan pendidikan juga. Maka dari itu agar pembiayaan pendidikan tepat sasaran haruslah memiliki rencana pendidikan yang baik.

Perencanaan pembiayaan pendidikan dibutuhkan sebab biaya untuk setiap lembaga pendidikan pada suatu wilayah itu berbeda dengan wilayah yang lain. Menurut Levin pemasukan dan sumber daya pembiayaan dalam pendidikan harus digunakan secara optimal untuk menjalankan proses operasional sekolah yang memiliki tingkat pendidikan yang berbeda dalam berbagai tempat (Fattah, 2008, p. 1). Maka dari itu, pemerintah melalui BSNP dalam setiap tahunnya menetapkan Standar Nasional Pendidikan, termasuk pada pembiayaan pendidikan. Standar Nasional Pendidikan merupakan kriteria dasar mengenai sistem pendidikan yang diterapkan di seluruh wilayah Indonesia dengan wilayah geografis yang berbeda.

Standar Nasional Pendidikan merupakan standar sebagai penjamin mutu pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah. Standar nasional tersebut menjadi komponen yang penting dalam terselenggaranya proses pembelajaran guna mencapai tujuan yang diharapkan. Banyak peneliti sebelumnya yang mengkaji mengenai ketercapaian indikator standar pembiayaan, namun mayoritas

dari mereka tidak mengkaji menurut persepsi guru, hanya menjamah persepsi ketercapaian indikator menurut persepsi kepala sekolah, inspektorat maupun bendahara sekolah.

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Atmaja yang meneliti pembiayaan pendidikan dalam perspektif kepala sekolah dan bendahara sekolah (Atmaja, 2016, p. 124). Demikian pula Mauluddin yang meneliti mengenai indikator standar pembiayaan menurut kepala sekolah (Mauluddin, 2014, p. 3). Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk menganalisis sejauh mana ketercapaian indikator standar pembiayaan dalam pelaksanaan dan capaiannya menurut pemahaman guru. Hal ini penting karena fungsi, kedudukan dan peran guru sangat strategis untuk mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran serta terlibat langsung mengenai kebijakan sekolah termasuk dalam hal ini aspek standar pembiayaan.

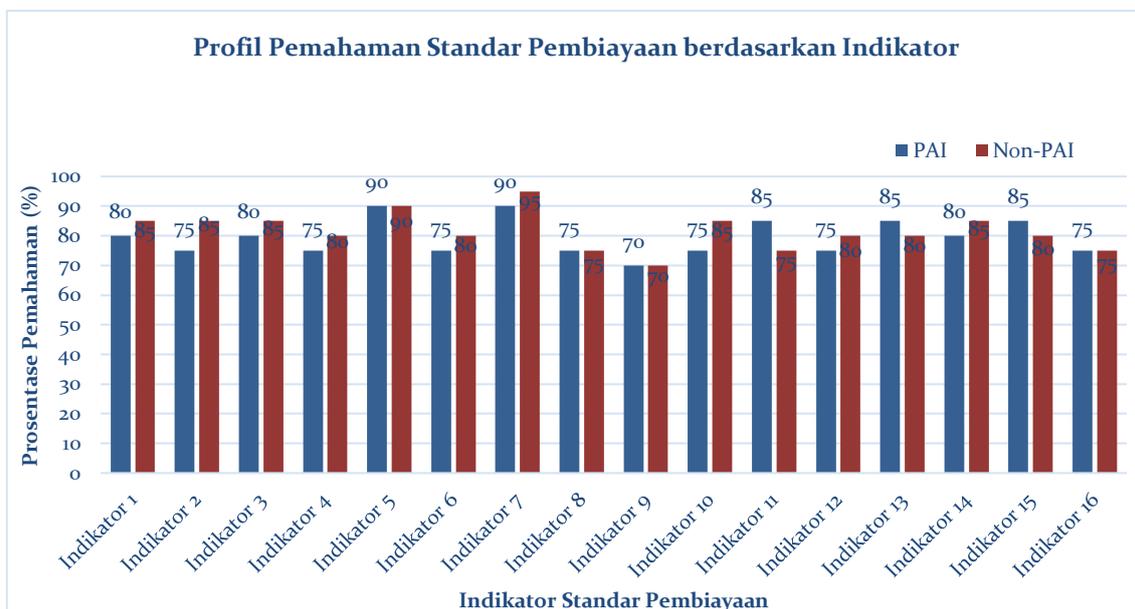
METODE DAN FOKUS PENELITIAN

Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini menganalisis dengan perhitungan mengenai persepsi guru terhadap indikator standar pembiayaan. Populasi penelitian adalah guru-guru di sekolah tingkat menengah atas yang memiliki sampel 5 (lima) orang guru PAI dan 5 (lima) orang guru Non-PAI dari beberapa sekolah yang terletak di Kabupaten Purwakarta. Instrumen yang digunakan adalah dengan menggunakan angket mengenai pemahaman terhadap standar pembiayaan. Indikator standar pembiayaan berjumlah 16 (enam belas) indikator, yaitu mengenai: (1) RKA untuk alokasi investasi; (2) RKA alokasi biaya operasi non-personalia; (3) dokumen investasi sarana dan prasarana; (4) biaya untuk pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan; (5) perealisasi modal kerja; (6) biaya operasional guru dan tenaga pendidik; (7) pengadaan alat tulis; (8) pengadaan bahan dan alat habis pakai; (9) perealisasi biaya pemeliharaan dan perbaikan berkala; (10) pembelanjaan biaya pengadaan daya dan jasa; (11) pembelanjaan biaya transportasi, perjalanan dinas dan konsumsi; (12) pembelanjaan dana untuk kegiatan pembinaan siswa; (13) anggaran untuk pelaporan; (14) pengelolaan sumbangan dana dari masyarakat/pemerintah; (15) pembukuan serta; (16) laporan dan penyampaian pertanggungjawaban keuangan.

Data dikumpulkan dengan cara memberikan lembar angket kepada guru-guru melalui media *Google Form*, kemudian data diolah dan dianalisis dengan menentukan terlebih dahulu indikator yang memiliki capaian paling tinggi dan rendah, serta melakukan perbandingan antara responden yang berdasarkan pada kelompok guru dan keseluruhan dari kelompok guru. Setelah data paling rendah diketahui, kemudian diberikan triangulasi melalui wawancara secara langsung untuk mengetahui penyebab dan solusi terhadap permasalahan terkait pencapaian standar pembiayaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengambilan dan analisis data tentang ketercapaian indikator standar pembiayaan guru PAI dan Non-PAI disajikan melalui profil ketercapaian, perbandingan, dan triangulasi pada indikator standar pembiayaan. Masing-masing hasil analisis akan disajikan melalui grafik dan pembahasan sebagai berikut.



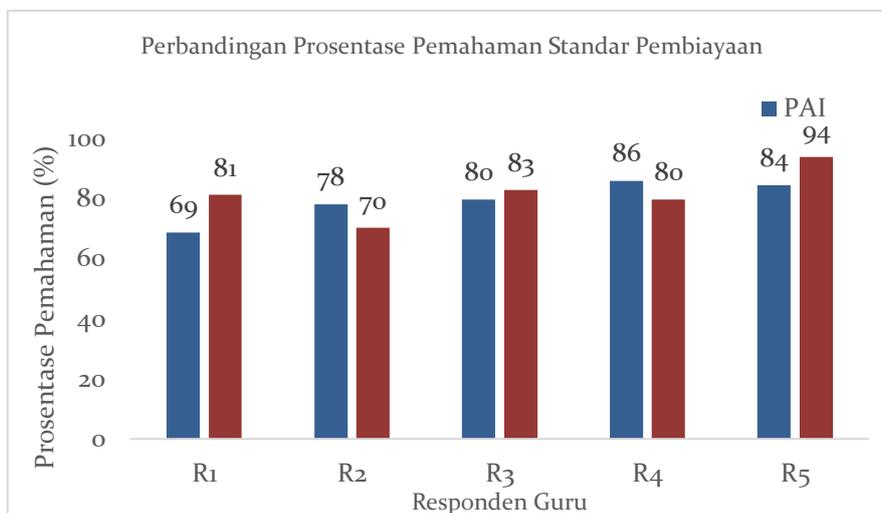
Grafik 1. Profil Pemahaman Standar Pembiayaan

Grafik 1 di atas menggambarkan tingkat capaian pemahaman pada setiap indikator dari standar pembiayaan. Secara keseluruhan ketercapaian Standar Pembiayaan tampak bervariasi, kedua kelompok Guru PAI maupun Non-PAI yang memiliki prosentase pemahaman terbesar terletak pada indikator 5 dan 7, indikator tersebut berkaitan dengan perealisasi modal kerja dan pengadaan alat tulis. Sedangkan indikator yang memiliki capaian paling rendah untuk kedua kelompok guru adalah indikator nomor 9, yakni berkaitan dengan perealisasi biaya pemeliharaan dan perbaikan berkala.

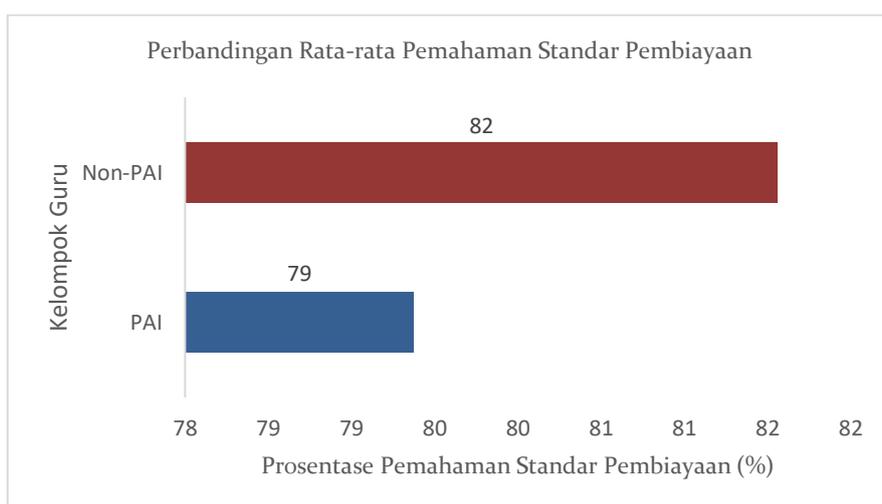
Profil pemahaman guru terhadap standar pembiayaan terlihat masih rendah pada indikator perealisasi rencana biaya pemeliharaan dan perbaikan berkala sarana dan prasarana. Senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Vida yang menemukan bahwa sarana dan prasarana pada sekolah belum memadai (Vida, 2017, p. 2). Begitu pula Budi yang mengemukakan bahwa sarana dan prasarana seyogyanya menjadi prioritas dalam pengelolaan anggaran sekolah (Budi, 2015, p. ii). Sementara itu Ruwaida meyakini bahwa salah satu faktor dalam perealisasi anggaran adalah perencanaan anggaran (Ruwaida, 2015, p. 102).

Berdasarkan informasi di atas, maka masalah utama pada standar pembiayaan adalah masih lemahnya perencanaan penganggaran yang dalam hal ini perealisasi anggaran untuk biaya pemeliharaan dan perbaikan berkala sarana dan prasarana. Kelemahan ini sangat mungkin disebabkan oleh minimnya kontrol sehingga perencanaan untuk meperealisasi pemeliharaan dan perbaikan berkala sarana dan prasarana menjadi kurang optimal.

Berdasarkan peran penting itu, institusi membutuhkan pengelolaan yang baik, dalam hal keberadaan dan model yang berlaku. Pada umumnya di dalam segala bidang, langkah menyusun pembiayaan untuk diperealisasi adalah hal yang penting, tak terkecuali di dalam bidang pendidikan. Hal ini senada dengan Jamaluddin dalam Uhar yang mengatakan bahwa anggaran merupakan rencana yang mengatur berbagai kebutuhan yang digunakan dalam waktu yang ditentukan (Uhar, 2010, p. 265).



Grafik 2. Perbandingan Prosentase Pemahaman Standar Pembiayaan



Grafik 3. Perbandingan Rata-Rata Pemahaman Standar Pembiayaan

Grafik 2 menunjukkan bahwa perbandingan pemahaman standar pembiayaan berdasarkan kelompok guru nampak berbeda. Responden dengan pemahaman tertinggi pada kelompok guru PAI diperoleh oleh responden keempat yaitu 86%. Sedangkan prosentase terendah adalah responden pertama yaitu 69%. Sementara itu prosentase tertinggi pada kelompok guru Non-PAI diperoleh oleh responden kelima yaitu 94%, sedangkan prosentase terendah adalah responden kedua yaitu 70%. Sedangkan Grafik 3 menunjukkan rata-rata prosentase pemahaman standar pembiayaan kelompok guru PAI dan Non-PAI, hasilnya prosentase pemahaman standar pembiayaan guru Non-PAI (82%) lebih tinggi dari pada kelompok guru PAI (79%).

Perbandingan prosentase pemahaman standar pembiayaan berdasarkan kelompok guru dapat diketahui bahwa kelompok guru Non-PAI lebih memahami mengenai standar pembiayaan. Senada dengan penelitian Mokhammad yang menemukan bahwa 90% guru memahami mengenai indikator standar pembiayaan (Mokhammad, 2019, p. 55). Sementara itu, prosentase yang terlihat masih rendah dalam pemahaman indikator standar pembiayaan diperoleh oleh kelompok Guru PAI. Sesuai dengan penelitian Johan yang menemukan bahwa meskipun persepsi guru termasuk dalam kategori baik, namun tetap saja guru mengharapkan perencanaan anggaran yang dikelola oleh sekolah yang lebih transparan serta akuntabel (Johan, 2016, p. 9).

Berdasarkan informasi di atas, maka masalah utama yang dihadapi dalam penelitian ini adalah masih lemahnya perencanaan anggaran pendidikan. Sehingga kelemahan ini sangat mungkin menyebabkan perealisasi anggaran pendidikan sekolah. Sesuai dengan penelitian Ruwaida yang

menemukan bahwa apabila perencanaan anggaran pendidikan dikelola dengan mekanisme yang baik maka perealisasi anggaran akan tercapai dengan baik (Ruwaida, 2015, p. 108).

Kecenderungan perbedaan pemahaman standar pembiayaan dari kelompok PAI dan Non-PAI ini apabila ditinjau dari aspek sosial, dapat ditentukan oleh lemahnya sosialisasi yang dilakukan oleh sekolah terhadap pendidik mengenai standar pembiayaan. Hal tersebut sangat penting dilakukan sebab dapat menjadi faktor pengembangan kompetensi pendidik, baik pada kelompok PAI maupun Non-PAI. Senada dengan Mei yang menyebutkan bahwa sosialisasi adalah usaha untuk menghasilkan pendidik menjadi lebih profesional (Mei, 2011, p. 198). Sosialisasi berkaitan erat dengan interaksi sosial yang dalam hal ini antara sesama pendidik. Demikian Soekanto yang menyatakan interaksi sosial membutuhkan aspek komunikasi (Soekanto, 1990, p. 58). Sedangkan menurut Wursanto komunikasi sangat dibutuhkan untuk mendapatkan informasi (Wursanto, 2005, p. 171). Dalam hal ini, komunikasi yang sangat dibutuhkan ialah komunikasi pendidik dengan pendidik.

Selain itu, perbedaan pemahaman ini terjadi karena kurangnya pertukaran informasi antara pendidik dengan pendidik. Demikian Rahman yang meyakini bahwa pertukaran pengetahuan dapat meningkatkan kapasitas individu guru (Rahman, 2016, 127). Termasuk dalam hal ini, ialah pertukaran pengetahuan tentang pemahaman pendidik mengenai indikator pada standar pembiayaan.

Triangulasi

Berdasarkan prosentasi dari hasil analisis profil pemahaman indikator dan perbandingan prosentase pemahaman standar pembiayaan, maka selanjutnya peneliti melakukan triangulasi, yang bertujuan untuk menggali informasi dan mendalami jawaban mengenai indikator terendah dari beberapa orang responden. Responden terdiri dari 1 (satu) orang Guru PAI dan 1 (satu) orang Guru Non-PAI. Adapun pertanyaan yang diungkapkan adalah: (1) Bagaimana menurut Bapak/Ibu penyebab indikator rendah/tidak paham atau lainnya? dan (2) Bagaimana menurut Bapak/Ibu cara meningkatkan indikator tersebut? Adapun hasil triangulasi dapat disajikan melalui tabel berikut.

Tabel 1. Triangulasi

Kel. Guru	Kode Responden	Indikator Terendah	
		Indikator 9	Indikator 16
PAI	R1	<ul style="list-style-type: none"> - Penyebabnya adalah pada saat perencanaan anggaran, sekolah tidak merencanakan dengan matang mana yang seharusnya menjadi prioritas dalam penganggaran dana. - Untuk meningkatkan indikator tersebut adalah pada saat perencanaan anggaran, memilih dengan bijak mana yang seharusnya menjadi urgensi bagi kebutuhan sekolah dalam penganggaran dana. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyebabnya adalah keterbatasan sumber daya manusia ketika peralihan transisi sistem pelaporan manual kepada sistem pelaporan berbasis <i>online</i>, sehingga pelaporan pertanggungjawaban masih berjalan walaupun terkesan lambat. - Untuk meningkatkan indikator tersebut dengan memberikan pelatihan-pelatihan khusus untuk meningkatkan kompetensinya dalam hal pelaporan berbasis <i>online</i> atau merekrut tenaga ahli yang mumpuni dalam bidangnya dengan menyediakan memaksimalkan fasilitas pendukung yang dibutuhkan.
Non-PAI	R2	<ul style="list-style-type: none"> - Penyebabnya adalah adalah kurangnya pengawasan dari pihak-pihak yang terkait dalam perealisasi anggaran yang telah direncanakan sebelumnya. - Untuk meningkatkannya perealisasi anggaran tentu dibutuhkan integrasi dan kolaborasi yang baik antara pihak-pihak yang terkait. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyebabnya adalah kurang optimalnya pengawasan dan evaluasi yang lebih terstruktur, yang dalam hal ini adalah pelaporan pertanggungjawaban. - Untuk meningkatkannya yaitu sebaiknya memaksimalkan pengawasan dan melakukan evaluasi yang terstruktur serta melibatkan semua pihak yang terkait untuk bersama mengevaluasi kebutuhan sekolah.

Berdasarkan informasi jawaban dari kedua kelompok responden maka dapat diungkap bahwa kesulitan mereka dalam memenuhi indikator 9 dan 16 adalah kurangnya perencanaan, pengawasan,

evaluasi dan pengelolaan anggaran untuk pembiayaan pendidikan yang dilakukan oleh pihak yang terkait di dalamnya.

Tulusmono menyimpulkan bahwa dalam pengelolaan keuangan dan penganggaran memerlukan strategi khusus untuk mengatur aliran dana masuk dan keluar dari suatu institusi, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, perealisasi, pengawasan, dan kemudian akuntansi (Tulusmono, 2010, p. 181).

Di dalam perencanaan penganggaran pendidikan terdapat tugas yang ditanggung oleh masing-masing anggota lembaga pendidikan, seperti dalam melaksanakan proses penganggaran merupakan tanggung jawab setiap koordinator standar pendidikan, dalam melaksanakan catatan anggaran ditugaskan pada bendahara, dan untuk mengawasi jalannya proses penganggaran dilakukan secara bersama secara internal dan eksternal termasuk kepala sekolah, yang kemudian dimuat dalam laporan pertanggungjawaban (Hayati, 2012).

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perealisasi perencanaan pembiayaan dalam hal pemeliharaan serta perbaikan berkala sarpras belum sesuai dengan rencana kerja dan anggaran. Ditemukan belum optimalnya pelaksanaan pelaporan pertanggungjawaban keuangan serta penyampaian pelaporan. Untuk mengatasi masalah perealisasi anggaran biaya harus diatur dengan perencanaan yang diawasi dan dipertanggungjawabkan lebih maksimal oleh sekolah. Selain itu kepala sekolah, wakil kepala sekolah termasuk bendahara dan komite sekolah terlibat aktif dalam merencanakan dan menyusun RKA dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Dan proses ini harus memiliki data yang sah dan komprehensif agar segala kebutuhan yang diperlukan dalam terselenggaranya pendidikan yang bermutu dapat diantisipasi dalam perencanaan anggaran. Dan untuk mengatasi masalah pelaporan tersebut maka disarankan bagi kepala sekolah untuk lebih mengawasi dan mengevaluasi perencanaan dan kebutuhan anggaran dengan lebih terstruktur, termasuk dalam aspek pelaporan pertanggungjawaban, agar semua kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan teralokasikan sesuai dengan kebutuhan sekolah dengan memenuhi ketentuan yang sistematis, transparan, efisien dan akuntabel. Bagi guru sebaiknya membantu untuk mengevaluasi perencanaan anggaran yang sesuai dengan kondisi sekolah.

REFERENSI

- Abdussalam, M. R. (2019). Analisis Ketercapaian Indikator Standar Pembiayaan pada SD Negeri Pamucatan Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Profesi Keguruan*, 5(1).
- Adawiah, V. (2017). "Analisis Pengelolaan Keuangan Sekolah di Sekolah Menengah Kejuruan Yasina Cigombong Kabupaten Bogor Tahun Ajaran 2015/2016". *Tesis*. Universitas Terbuka.
- Atmaja, R. T. E., Harun, C. Z., & Ibrahim, S. (2016). Analisis Penetapan Standar Biaya Pendidikan pada SMA Negeri 2 Kuala Kabupaten Nagan Raya. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 4(1).
- Chuo, C. M. (2011). Student Teachers Socialization Development by Teaching Blog: Reflections and Socialization Strategies. *Journal of Educational Technology*, 10(2).
- Elviera, C. D., Irawan, D., & Syafrina, D. N. (2019). Pengembangan Tata Usaha Sekolah Berbasis Teknologi Informasi. *Mukadimah: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial*, 3(1), 1–6.
- Fattah, N. (1999). Analisis Hubungan Pembiayaan Pendidikan Dasar dengan Mutu Proses dan Hasil Belajar. *Jurnal Mimbar Pendidikan*, 1(3).
- Fattah, N. (2008). Pembiayaan Pendidikan: Landasan Teori dan Studi Empiris. *Jurnal Pendidikan Dasar*, (9), 417–436.
- Hayati, E. D. (2012). Manajemen Pembiayaan Berbasis Sekolah di RSBI SMPN 3 Mranggen Demak. *Educational Management*, 1(2).

- Karyono, J. P. J. (2016). Persepsi Guru tentang Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah, Transparansi, dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah. *EQUILIBRIUM*, 4(1), 1–12.
- Mauluddin, U., Matsum, J. H., & Asriati, N. (2014). Implementasi Standar Pembiayaan Pendidikan oleh Kepala SDN Se Kecamatan Sungai Raya Kepulauan. *Artikel Penelitian*. Universitas Tanjungpura.
- Peraturan Pemerintah RI. (2008). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
- Ruwaida, Darwanis, & Abdullah, S. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perealisasian Anggaran Belanja Pendidikan di Provinsi Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi*, 4(4), 101–110.
- Soekanto, S. (1990). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono. (2016). Upaya Manajerial Pengembangan Kurikulum Program Unggulan di Madrasah Aliyah. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 4(1), 92–115.
- Suharsaputra, U. (2010). *Administrasi Pendidikan*. Bandung: Refika Aditama.
- Supeni, B. S. (2015). “Analisis Laporan Perealisasian Anggaran dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Di SMA Negeri 5 Madiun”. *Tesis*. Universitas Sebelas Maret.
- Supriadi, D. (2006). *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Syamsudin. (2009). “Pengaruh Biaya Pendidikan Terhadap Mutu Hasil Belajar Melalui Mutu Proses Belajar Mengajar pada Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Asahan”. *Tesis*. Universitas Sumatera Utara.
- Taufiqurrahman. (2016). Menggagas Pengelolaan Penilaian untuk Peningkatan Pembelajaran. *JPII*, 1(1).
- Tulusmono. (2010). Manajemen Kesiswaan dan Manajemen Keuangan di Madrasah dan Sekolah Islam. *Jurnal Mudarrisa*, 4(2).
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Wursanto, I. (2005). *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.